

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



LHP PROVINSI JAWA TENGAH TA 2013: WAJAR TANPA PENGECUALIAN DENGAN PARAGRAF PENJELASAN

Semarang, **Rabu (28 Mei 2014)** – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. LHP ini diserahkan oleh Auditor Utama V, **DR Bambang Pamungkas** dengan didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, **Ignasius Bambang Adiputranta** yang diserahkan kepada Plt. Ketua DPRD, **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jawa Tengah, **Ganjar Pranowo** dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2013, BPK RI memberikan : **OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN, DENGAN PARAGRAF PENJELASAN.**

Hal-hal yang menjadi penekanan dalam paragraf penjelasan adalah (1) Aset tanah jalan dan tanah irigasi yang bukti kepemilikannya atas nama Pemerintah Pusat masih perlu divalidasi untuk meyakini keberadaan dan hak penguasaannya; (2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan kebijakan akuntansi penyusutan atas Peralatan dan Mesin selain Alat Angkutan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Aset Lain-lain.

Pada kesempatan ini, BPK RI kembali mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mempersiapkan diri untuk menyampaikan laporan keuangan berbasis akual, yang tidak saja menyajikan aspek informasi keuangan yang lebih komprehensif namun juga lebih kompleks sehingga membutuhkan kompetensi dan konsentrasi yang lebih tinggi dalam pengerjaannya. Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BPK RI menghimbau kepada Pemerinta Provinsi Jawa Tengah agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP, sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi dalam LHP sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Telepon : 024-8660825,8660826.8660883 ext 1008; Fax : 024-8660884

Email : semarang@bpk.go.id